


ARTIKEL

Desa Cerdas dan Inovasi Pelayanan Publik di Masa Endemi

Belajar dari Desa Mojowarno

Smart Village and Public Service Innovation in Endemic Times

Learning from Mojowarno Village

M. Nur Rofiq Addiansyah  

Program Studi Pemikiran Politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus

 mnurrofiq@iainkudus.ac.id

Abstrak: Endemi dan gencarnya perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tulisan ini memberikan bukti bagaimana pemerintah desa mampu menyesuaikan hal tersebut. Proses adaptasi tersebut meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi bisa sukses dilaksanakan. Berbagai keunggulan seperti kepemimpinan yang efektif, perangkat desa yang kompeten hingga masyarakat yang melek teknologi menjadi faktor pendukung pelaksanaan *smart village* di desa ini. Metode penelitian yang kami lakukan yakni metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni data primer dengan wawancara serta data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang tersedia secara *online*, baik melalui *website* maupun media sosial. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa *smart village* bisa dikembangkan di Desa Mojowarno, antara lain: adanya kemajuan penggunaan teknologi digital di Desa Mojowarno, serta kepemimpinan dan kepekaan kepala desa dalam merespons kebutuhan warga. Atas dasar argumentasi ini maka inovasi-inovasi pelayanan publik di Desa Mojowarno dapat terus berjalan.

Kata Kunci: Desa Cerdas; Inovasi Pelayanan; Endemi; Desa Mojowarno.

Abstract: *Endemic and the incessant development of technology and information have had a new impact on governance. This paper provides evidence of how the village government is able to adjust to this. The adaptation process, although it takes a long time, can be successfully carried out. Various advantages such as effective leadership, competent village officials to technologically literate people are supporting factors for the implementation of smart villages in this village. Our research method is a qualitative method with data collection techniques, namely primary data with interviews and secondary data. Primary data collection was carried out by means of interviews while secondary data collection was carried out by collecting data available online, either through websites or social media. There are several reasons why smart villages can be developed in Mojowarno Village, including: the leadership of the village head who is very persistent, then the creativity of village officials and the third, namely the majority of people who are already literate in technology. On the basis of this argument, public service innovations in Mojowarno Village can continue.*

Keywords: *Smart Village; Service Innovation; Endemic; Mojowarno Village.*



OPEN ACCESS

Sitasi: Addiansyah, M. N. R. (2024). Desa Cerdas dan Inovasi Pelayanan Publik di Masa Endemi: Belajar dari Desa Mojowarno. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.75-88>

Dikirim: 31 April 2024

Diterima: 7 Agustus 2024

Diterbitkan: 14 Agustus 2024

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi [Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

1. Pendahuluan

Kajian dalam riset ini akan mendiskusikan tentang masa endemi yang terjadi pada saat COVID-19 terjadi serta bagaimana strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dalam bingkai desa cerdas atau desa digital. Ruang kajian yang akan kami diskusikan lebih lanjut adalah bagaimana praktik desa cerdas ini dilakukan di Desa Mojowarno, desa di pesisir utara Jawa Tengah yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. *Smart village* atau yang lebih populer dengan sebutan desa cerdas adalah istilah yang mayoritas masyarakat khususnya masyarakat desa sendiri belum paham. Tetapi lama kelamaan mengikuti berjalannya waktu, masyarakat akan paham dan mengerti tentang apa itu desa cerdas atau *smart village*. Proses edukasi dan penguatan literasi tentang desa cerdas ini cepat atau lambat akan dipahami masyarakat.

Masyarakat juga akan semakin paham dan mengerti karena bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat sudah akrab dengan kampanye digital, pembayaran pajak *online*, belanja *online*, pelayanan kesehatan secara *online* hingga semakin banyaknya pelayanan digital seiring perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Edelmann & Virkar, 2023).

Di masa endemi, berbagai kegiatan serta rangkaian proses penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan baru mulai diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita membincang terkait proses adaptasi dan berbagai inovasi di masa endemi, maka alangkah baiknya bila kita membincang sedikit terkait bagaimana dan apa sejatinya perbedaan antara endemi, epidemi serta pandemi, Pertama, Endemi, di waktu terjadinya endemi, sejatinya masyarakat yang terdampak ini relatif kecil. Tapi dampak atau efek yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Beberapa penyakit yang akrab kita hubungkan dengan endemi antara lain demam berdarah, campak hingga malaria. Kemudian yang kedua yakni epidemi, sifat penyakit lebih besar dari sifat lainnya yang menyebar ke area yang jangkauannya lebih luas. Kasus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) yang pernah memiliki penyebaran masif di Indonesia dapat kita kategorikan sebagai endemi. Status yang ketiga yakni adalah pandemi, yaitu kasus yang sifat penyebarannya sangat luas dan dampak yang ditimbulkan pun memiliki jangkauan yang sangat luas juga. Contoh kasus yang ketiga ini misalnya adalah COVID-19. World Health Organization (WHO) sendiri juga telah menetapkan Coronavirus Disease (COVID-19) dapat dikategorikan sebagai pandemi (BRIN, 2020).

Menelusuri kajian-kajian tentang *smart village*, sebenarnya ada beberapa literatur-literatur yang sudah mengkaji kajian tentang itu. Beberapa di antara tulisan-tulisan tersebut antara lain penelitian-penelitian dengan titik kajian tentang *smart village* dan pengembangan desa. Kajian ini seperti yang ditulis oleh Yulianto (2020) dan Nurfarida (2019). Penelitian yang lain misalnya dilakukan oleh Dian Herdiana yang berjudul tentang “Pengembangan Konsep *Smart village* Bagi Desa-Desa di Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019 (Herdiana, 2019). Berikutnya tulisan-tulisan tentang *smart village* pada umumnya banyak menyinggung terkait pengembangan teknis *smart village* ini secara komprehensif. Tulisan ini ditulis oleh Faisal dan Suharjito (2021), Komorowski dan Stanny (2020) dan Andari dan Ella (2019). Selanjutnya ada juga tulisan-tulisan yang membincang terkait *smart village* dan kesenjangan digital, tulisan ini secara komprehensif ditulis oleh Susanti dkk. (2023). Kemudian tulisan dengan argumentasi komprehensif tentang *smart village* sebagai upaya dalam mengatasi kesenjangan digital ditulis oleh Lakshmanan dkk. (2022). Dari berbagai penelitian-penelitian yang kami lacak, pada umumnya tulisan-

tulisan yang tersedia masih seputar *smart village* dan inovasi-inovasi pengembangan aplikasi, belum ada yang memiliki titik tekan pada *smart village* dan endemi.

Ada beberapa alasan utama mengapa tulisan ini layak untuk diangkat dan dijadikan refleksi dalam berpikir. Pertama, adanya persepsi masyarakat bahwa masyarakat desa merupakan masyarakat yang terbelakang, bodoh, udik, miskin, minim pengalaman dan berbagai persepsi negatif lainnya. Hal ini seperti yang penulis temukan dalam kajian-kajian yang ditulis dalam buku cerdas yang di tulis oleh akademisi-akademisi dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (Santoso dkk., 2019). Fakta ini menyebabkan jutaan masyarakat setiap tahun harus ramai-ramai berpindah ke kota. Sebagai data pendukung, di Tahun 2010 jumlah penduduk di kawasan perkotaan mencapai 49,8, kemudian pada Tahun 2015 jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 53,3%. Data ini pun terus naik, di mana jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 56,7%. Menurut prediksi BPJS, angka ini akan terus melejit naik hingga di angka 60% dan penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada Tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2020). Kedua, adanya desa cerdas akan mendukung proses dan terwujudnya demokratisasi di tingkat lokal, terutama di desa. Dalam proses demokratisasi ini, terwujudnya desa cerdas seperti kewajiban, hal ini karena dengan adanya desa cerdas akan turut serta mencerdaskan masyarakat, dan dari masyarakat yang cerdas akan memunculkan masyarakat yang mampu berperan aktif. Ketiga, Desa Mojowarno merupakan *pilot project* penerapan *smart village* di Kabupaten Rembang. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung sangat menarik apabila kita bahas lebih dalam khususnya terkait bagaimana strategi dan inovasi yang dilakukan di Desa Mojowarno khususnya masa endemi ini terjadi. Bagaimana Desa Mojowarno menunjukkan keunggulannya, hal ini seperti konsep dasar pengembangan desa cerdas yang diungkapkan dalam gagasan Herdiana (2019). Keempat, karena pelayanan inovatif di Desa Mojowarno menjadikan desa ini menjadi desa dengan perkembangan positif peringkat ke II tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2019, desa dan kelurahan terinovatif Tahun 2022 tingkat Kabupaten Rembang serta masuk 10 besar desa dengan keterbukaan informasi terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Mojowarno, 2023). Didasari argumentasi di atas, maka sangat wajar untuk mengangkat isu tersebut. Lebih jauh, tulisan ini akan menggali lebih jauh terkait bagaimana Pemerintah Desa Mojowarno dalam pengembangan *smart village* atau desa cerdas.

2. Metode

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu proses atau aktivitas ilmiah yang di dalamnya sudah diatur secara terkonsep, sistematis dan memiliki konsep dan tujuan yang jelas baik secara teoritis maupun praktis (Somantri, 2005). Desain penelitian yang ditentukan dalam riset ini adalah metode riset kualitatif dengan tipe studi kasus. Untuk data yang dibutuhkan dalam riset ini berupa data primer dan data sekunder (Noor, 2008). Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa Mojowarno selaku pemimpin desa, kemudian kedua dengan perangkat desa yang juga pengelola *smart village* di Desa Mojowarno, serta masyarakat Desa Mojowarno, narasumber ini kami pilih karena yang bersangkutan terkait erat dengan adanya *Smart Village* di Desa Mojowarno. Adapun data sekunder kami peroleh dari dokumen-dokumen milik desa yang memiliki keterkaitan dengan riset ini serta dapat kita akses baik secara *online* maupun *offline* (Bungin, 2020). Dokumen-dokumen ini menjadi data penting karena sifat data yang mengalami perkembangan secara cepat. Untuk teknik analisis data, diawali dari proses reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan *display* data dan diakhiri penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Desa Cerdas dan Pelayanan Publik Masa Endemi di Desa Mojowarno

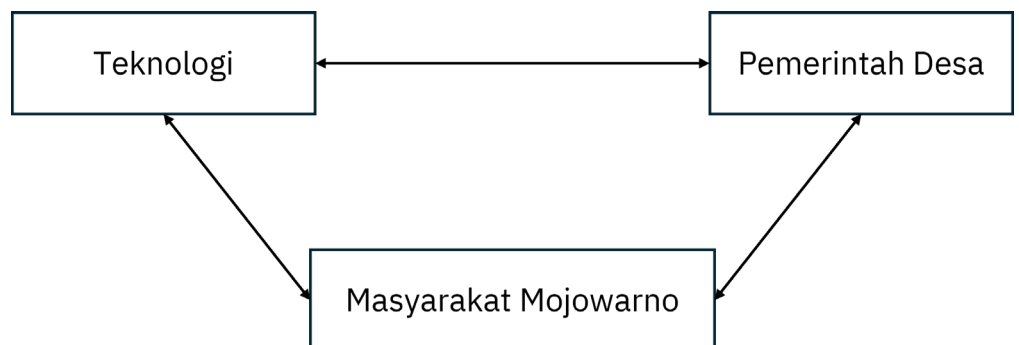
Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai proses atau ikatan dari norma dan praktik yang memberi titik tekan pada demokrasi serta masyarakat sebagai bagian dari basis utama dari praktik atau teori administrasi (Denhardt & Denhardt, 2015). Di Indonesia sendiri dalam rentang tahun 2014 hingga tahun 2016 misalnya, inovasi pelayanan publik yang dirasakan masyarakat mayoritas dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal (Pratama, 2019). Adapun pelayanan publik di masa pandemi hingga endemi, menuntut pemerintah memberikan informasi yang detail terkait standar layanan, sistem layanan hingga kompetensi pelayanan yang dilakukan serba *online* (Rifani, 2021), serta penyedia layanan harus memberi data-data yang akurat dalam waktu cepat (Febri Ramadhan & Tamaya, 2021).

Inovasi pelayanan juga harus sesuai dengan jenis, bentuk dan sifat kebutuhan yang telah mengalami perubahan tersebut (Haryati & Ferriswara, 2020). Dapat dikatakan kondisi endemi benar-benar menuntut pemerintah, termasuk pemerintah desa harus memberikan informasi secara komprehensif terkait standar pelayanan, sistem layanan hingga pelayan desa yang kompeten.

Untuk merespons hal di atas, Pemerintah Desa Mojowarno telah berusaha menyediakan informasi sedetail mungkin. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Fahrurrohman, inisiator desa cerdas di desa ini.

“Inovasi pelayanan *online* yang dimulai saat terjadinya pandemi di Indonesia Tahun 2020 memberi bukti bila pemerintah desa sudah benar-benar responsif, pelatihan-pelatihan penggunaan IT juga dilakukan kepada seluruh perangkat desa selaku penyedia layanan. Inovasi-inovasi pelayanan pun diberikan berdasarkan urutan prioritas, misal mulai dari pelayanan kependudukan hingga pelayanan terkait COVID-19” (Fahrurrohman, 2022).

Dalam merespons kebutuhan masyarakat, Desa Mojowarno kemudian mengembangkan desa cerdas. Konsep ini merupakan proses pengintegrasian antara teknologi, pemerintah serta pelayanan publik (Aziiza & Susanto, 2020). Adapun proses integrasi ketiga aktor di atas seharusnya tidak berjalan searah, tapi bagaimana *smart village* atau desa cerdas yang dikembangkan ini bisa berjalan dalam dua arah, sehingga proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat bisa terus dan tetap berjalan secara dinamis (Nursetiawan, 2020).



Gambar 1. Relasi antara Teknologi, Pemerintah Desa dan Masyarakat

Sumber: Adaptasi Augmentation to the ABCD Model oleh Maclure, 2023 (diolah Penulis)

Tabel 1. Berbagai inovasi pelayanan publik di Desa Mojowarno dan Respon Masyarakat

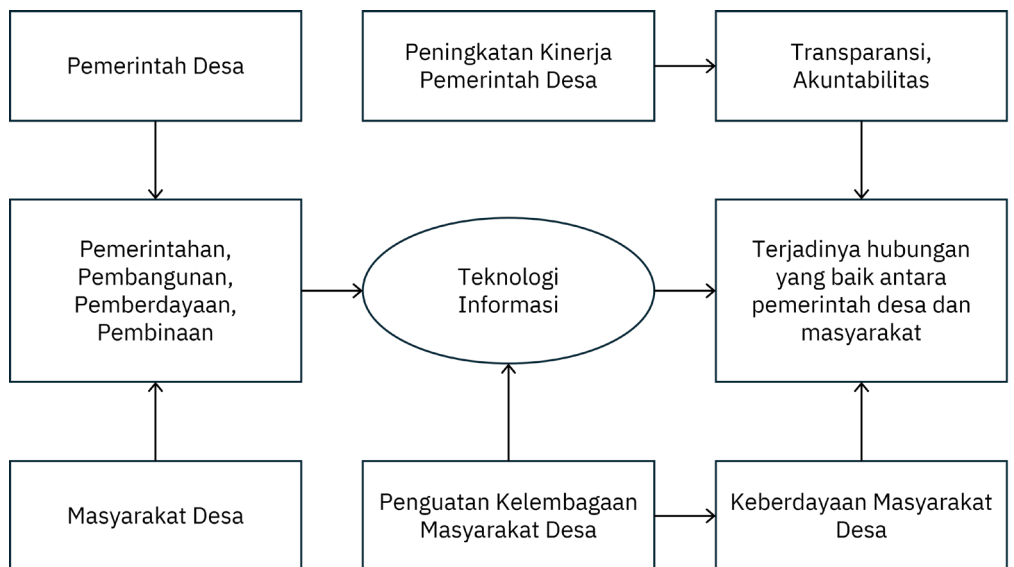
No.	Nama Layanan	Jenis-Jenis Layanan	Respon Masyarakat
1	Pak De Mono	Inovasi Pelayanan Publik di Desa Mojowarno, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan dimanapun dan kapanpun dengan HP atau Laptop dalam waktu 1 menit.	Masyarakat sangat terbantu, berbagai kebutuhan layanan dengan cepat dapat dirasakan.
2	Open Desa dan Layanan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik Desa Mojowarno.	Masyarakat sangat antusias mendukung, Open Desa di Desa Mojowarno berhasil membawa Desa ini menjadi 11 desa paling informatif di Jawa Tengah.
3	Anjungan Desa Mandiri	Tata cara pengajuan surat melalui ATM Desa. Masyarakat memasukkan NIK dari rumah atau di lokasi kantor desa, kemudian tinggal datang dan mengambil surat yang diinginkan.	Masyarakat merasa terbantu dengan adanya layanan ini. Lebih cepat dalam mendapatkan layanan.
4	Pecel Lele (Pelayanan Catatan Sipil di Desa, Lebih Deat Lebih Mudah)	Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Identitas Anak, KTP, Pindah Datang dan Pindah Keluar.	Masyarakat merespon positif adanya inovasi Pecel Lele di Desa Mojowarno, berbagai layanan kependudukan yang sebelumnya susah menjadi lebih mudah.
5	Layanan Chat Bot melalui Telegram	Layanan instan kepada masyarakat melalui telegram.	Masyarakat Desa Mojowarno merespon positif adanya layanan publik melalui chat di Telegram.

Sumber: Data diolah oleh penulis

Proses ini juga terjadi di Desa Mojowarno, ketika pesatnya teknologi, kemudian direspons Pemerintah Desa Mojowarno dengan berbagai inovasi yang dihasilkan, kemudian dengan inovasi tersebut, pemerintah desa berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Lalu beragam pelayanan tersebut kemudian mendapat respons langsung dari masyarakat.

Dengan ditunjang perkembangan teknologi serta informasi, hal ini menyebabkan pemerintah desa mampu meningkatkan kinerja dari pemerintahannya serta mampu menggerakkan lembaga yang ada di desa. Perkembangan teknologi yang diimbangi dengan kecakapan digital perangkat desa terbukti mampu melahirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang hadir di Desa Mojowarno. Inovasi ini pun mendapat respons positif dari masyarakat.

Untuk berikutnya, apabila kinerja dari pemerintah desa ini bisa ditingkatkan, maka transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan nilai-nilai dari *spirit good governance* akan turut serta menyertai peningkatan spirit tata kelola pemerintahan yang baik (Herdiana, 2019).



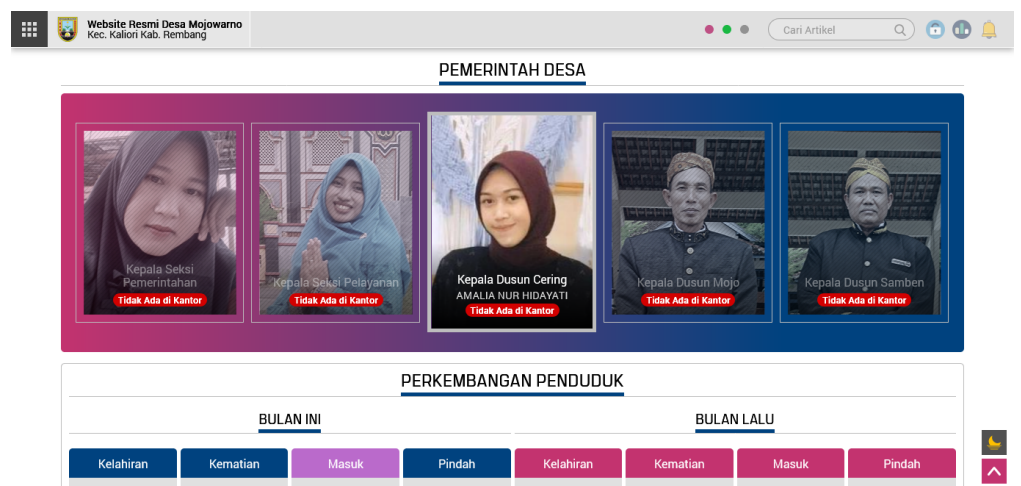
Gambar 2. Relasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: Herdiana (2019)

Penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Mojowarno sesuai kenyataannya dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik ketika teknologi dapat dikemas serta digunakan dalam konsep *smart village*. Dalam konteks desa cerdas, penggunaan teknologi informasi bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Efektifnya pelayanan masyarakat ini juga dirasakan mayoritas masyarakat Desa Mojowarno. Hal ini, seperti yang dirasakan oleh salah satu warga desa ini:

“Kami merasakan nyamannya pelayanan yang diberikan pemerintah desa, bila dulu biasanya untuk membuat KTP saja kita mondar-mandir bolak-balik ke kantor desa dengan berkas yang selalu kurang, saat ini sekali klik saja semua sudah beres. Benar-benar membantu kami”, (Sulistiyowati, 2023). Indikator lain suksesnya pelayanan publik di Desa Mojowarno ini antara lain sebagai berikut di bawah ini.

Dalam hal pelayanan publik, Terkait pelayanan publik yang ada di Desa Mojowarno, tentu saja masyarakat akan semakin mengerti tentang dinamika yang terjadi di Desa Mojowarno. Di *website* Desa Mojowarno juga telah disediakan berbagai menu layanan yang ada di desa. Isi *website* desa ini lumayan lengkap seperti menu organisasi pemerintahan desa, hingga Ketua RT, juga menu yang lain seperti struktur kepengurusan badan legislatif desa yaitu badan permusyawaratan desa atau BPD juga tersedia di *website* ini. Selain itu, *website* desa ini juga memuat menu lembaga-lembaga desa yang lain seperti KPMD (Komisaris Pemberdayaan Masyarakat Desa), RT, RW, KPAD, PKK, Karang Taruna dan lembaga-lembaga pendukung pemerintahan desa yang lainnya. Tersedia di *website* desa ini.



Gambar 3. Menu Pemerintahan di Website Desa Mojowarno

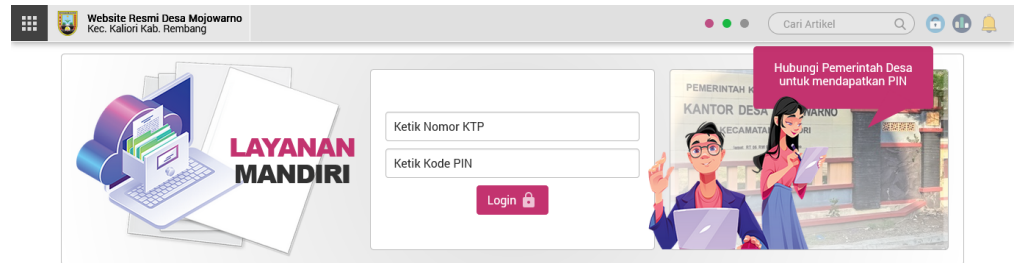
Sumber: Website Desa Mojowarno

Visi penting kepala desa ini selama 6 tahun terakhir yaitu adalah melayani masyarakat Desa Mojowarno secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Mojowarno yang maju, mandiri dan sejahtera. Sebagai bentuk dari usaha untuk mewujudkan visi tersebut, seluruh perangkat desa dan masyarakat desa ini secara semangat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bahkan proses digitalisasi yang hadir di Desa Mojowarno tetap berlanjut meskipun pemimpin desa ini berganti dengan kepala desa yang baru. Hal ini setidaknya memberi bukti jika keberlangsungan proses pembentukan desa cerdas di Desa Mojowarno ini masih tetap berlangsung.

Dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan, semisal saat ada masyarakat yang menginginkan mengurus surat pindah, akta kematian, akta kelahiran, surat pembagian warisan, kartu keluarga, persyaratan pernikahan dan perceraian serta pengurusan administrasi kependudukan yang lainnya Pemerintah

Desa Mojowarno menyediakan layanan mandiri secara cepat dan juga dapat diukur. Untuk masuk di menu itu maka masyarakat harus membuat aktivasi PIN di desa, di mana PIN ini dapat berlaku sepanjang hidup. Untuk bisa mendapatkan akses layanan ini, masyarakat bisa memanfaatkan telepon genggam ataupun juga laptop di rumah dan juga bisa menggunakan ATM layanan digital yang ada di Kantor Desa Mojowarno.

Gambar 4. Layanan Mandiri Bagi Masyarakat Mojowarno



Sumber: Website Desa Mojowarno

Selain itu, masyarakat Desa Mojowarno juga bisa semakin aktif dalam mengontrol bagaimana anggaran ini digunakan dalam pembangunan. Masyarakat juga diperkenankan untuk memberikan masukan jika memang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini proses interaksi ini semakin memperkuat demokrasi digital (Congge dkk., 2023), proses digital demokrasi ini mensyaratkan adanya kesetaraan informasi antara masyarakat dengan pejabat. Proses masukan dari masyarakat pun bisa direspons dengan cepat dan dibaca langsung oleh pemimpin desa, sehingga bisa direncanakan dan dilaksanakan secara lebih matang.

Gambar 5. Proses Interaksi Masyarakat

PERKEMBANGAN PENDUDUK							
BULAN INI				BULAN LALU			
Kelahiran	Kematian	Masuk	Pindah	Kelahiran	Kematian	Masuk	Pindah
0 Orang	0 Orang	2 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 Orang	0 Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR							
Hari Ini	Kemarin	Minggu Ini	Bulan Ini	Bulan Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Total
0 Surat	0 Surat	0 Surat	1 Surat	0 Surat	22 Surat	62 Surat	337 Surat

Sumber: website Desa Mojowarno

Dapat dikatakan, dengan adanya platform pengaduan seperti yang telah penulis paparkan di atas, maka ada dua hal yang dipraktikkan. Pertama, adanya proses demokratisasi di masyarakat yang terus diperkuat. Masyarakat yang pintar sangat dibutuhkan dalam ruang demokrasi digital. Masyarakat yang cerdas di tingkat lokal ini tentu saja menjadi amunisi utama dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal (Sánchez-Huertas & Martínez Garbiras, 2023). Kemampuan masyarakat dalam melaporkan keluhan, keberanian masyarakat serta kecakapan dalam berkomunikasi di era digital adalah prasyarat mutlak yang setidaknya harus dipenuhi.

Kedua, perkembangan teknologi dan informasi menjadi media kolaboratif antara masyarakat serta pemerintah desa dalam mengenali berbagai persoalan. Ketika pemerintah mengenali masalah apa yang terjadi, tentu respons hingga solusi berlangsung lebih cepat. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga telah di pajang secara jelas di halaman website desa ini. Berapa alokasi anggaran

yang dialokasikan hingga berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan semua telah terpampang dengan jelas.

3.2. Dimensi Pengembangan Desa Cerdas di Desa Mojowarno

Untuk melihat sejauh mana kegiatan pengembangan *smart village* di Desa Mojowarno, maka akan kita paparkan dengan table dibawah ini dengan pendekatan [Santoso dkk. \(2019\)](#). Akan tetapi dalam pendalaman desa cerdas di setiap dimensi, kami coba elaborasi dengan berbagai pendekatan lain sebagai penguat argumentasi. Pendekatan ini melihat beberapa dimensi dalam *smart village* yang kemudian menjadi standar dalam analisis riset dalam tulisan ini. Beberapa dimensi itu antara lain *smart people*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart living*, *smart governance*, *smart tourism*, hingga *smart environment*. Adapun paparan di bawah ini kita kontekskan dengan kondisi yang ada di Desa Mojowarno saat ini:

Pertama, *smart people*. dimensi yang pertama dari *smart people* adalah kreativitas. Pada dimensi ini, Pemerintah Desa Mojowarno benar-benar sudah menunjukkan kreativitasnya. Kreativitas ini lahir dari berbagai ide yang didapat baik dari operator desa cerdas di desa ini maupun hasil kolaborasi atau kerja sama dengan pihak kabupaten dan pihak provinsi. Kuatnya sinergi antara *smart people*, *smart city* dan *smart village* ini menjadi titik fokus utama ketika kita ingin mengembangkan *smart village* di desa ([Pangestuti dkk., 2021](#)).

Aspek kreativitas ini bisa terlihat dari banyaknya menu-menu informatif dan kreatif terkait Desa Mojowarno. Menu-menu yang tersaji antara lain rekam kehadiran kepala desa dan perangkat desa, hasil-hasil olahan UMKM di desa, SDGs Desa, indeks pembangunan di desa, artikel berita, transparansi anggaran dan beragam menu lainnya. Bahkan di *website* desa ini juga terhubung dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SID Kementerian Desa, RSUD Rembang dan JDIIH Kabupaten Rembang. Menu-menu ini dapat diakses masyarakat dengan mudah melalui *website* desa, melalui media sosial-media sosial milik desa seperti Instagram dan Facebook.

Kreativitas dalam teknologi ini juga menjadi syarat wajib bagi desa atau pemerintah daerah yang ingin mengembangkan desa cerdas atau kota cerdas di wilayahnya masing-masing. Sebagai bukti, Desa Mojowarno beberapa kali dinobatkan sebagai Desa paling kreatif di Kabupaten Rembang Tahun 2022 hingga mendapat *reward* serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana literatur yang kami baca, masyarakat yang cerdas juga menjadi salah satu poin utama dalam mewujudkan desa cerdas ([de Lange, 2018](#)), maka sebagai pendukung utama dalam mewujudkan desa cerdas di Desa Mojowarno adalah kecerdasan masyarakatnya sendiri. Aspek kedua dari *smart people* ini adalah edukasi digital. Kegiatan edukasi digital juga dilaksanakan dengan gencar, berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan berkonten digital juga dilaksanakan. Edukasi digital mengharuskan transformasi masyarakat yang sebelumnya bergerak dalam ruang-ruang manual menjadi *digital society* yang mengandalkan teknologi ([Degada dkk., 2021](#)).

Kegiatan pelatihan-pelatihan ini tidak hanya melibatkan perangkat desa ataupun masyarakat desa setempat, tetapi berbagai kegiatan pelatihan untuk siapa pun yang ingin belajar di Desa Mojowarno, maka Pemdes Mojowarno akan menerima dan membuka diri. Edukasi digital mengharuskan transformasi masyarakat yang sebelumnya bergerak dalam ruang-ruang manual menjadi *digital society* yang mengandalkan teknologi ([Degada dkk., 2021](#)).

Kegiatan pelatihan-pelatihan ini tidak hanya melibatkan perangkat desa ataupun masyarakat desa setempat, tetapi berbagai kegiatan pelatihan untuk siapa pun yang ingin belajar di Desa Mojowarno, maka Pemdes Mojowarno akan menerima dan membuka diri. Dalam rekap data yang masuk, banyak desa-desa khususnya di wilayah Pantura yang berdatangan ke Desa Mojowarno untuk belajar dalam pengelolaan *smart village*.

Kedua adalah, aspek dimensi ekonomi. Adapun aspek yang pertama adalah kewirausahaan. Dalam mewujudkan desa cerdas yang ada di Desa Mojowarno ini juga dibutuhkan mental masyarakat desa yang cerdas (Vanolo, 2014). Kerja sama multiaktor dibutuhkan dalam mewujudkan Desa Mojowarno cerdas, antara lain pihak pemerintah desa, masyarakat, *non government organization* dan juga mitra bisnis, Semua aktor ini dibutuhkan sesuai peranan masing-masing. Untuk *smart economy* ini Pemerintah Desa Mojowarno menyediakan lapak secara *online* yang terintegrasi dengan website desa dengan alamat URL sebagai berikut: <https://mojowarno-rembang.desa.id/lapak>.

Dari lapak ini kita bisa mendapatkan informasi kuliner ataupun jasa yang disediakan pihak desa untuk pengunjung atau masyarakat desa ini secara umumnya. Informasi terbaru dari lapak desa di Desa Mojowarno ini antara lain sebagai berikut, dalam lapak desa yang terpublikasi di *website* desa ini terdapat berbagai produk barang maupun jasa yang ditawarkan mulai dari pangkas rambut, dan berbagai usaha mikro kecil menengah seperti *seblak*, mie ayam, jahe merah dan berbagai karya penduduk desa ini sendiri.

Aspek kedua adalah inovasi, berbagai inovasi juga telah dilakukan pihak pengelola desa cerdas di desa ini. Misalnya melakukan peningkatan konten ataupun kualitas *website*, memperbaharui produk-produk yang ditawarkan serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Selain itu juga ada jasa pengaduan bila jasa dan produk yang ditawarkan tidak sesuai standar.

Dimensi yang ketiga adalah *smart mobility*, Untuk aspek pertama yaitu infrastruktur TIK, di mana infrastruktur TIK di Desa Mojowarno terus diperbaharui, awalnya operator Telkomsel, kemudian sekarang berbagai operator seluler sudah bisa masuk (Jiang dkk., 2023). Pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi ini juga menjadi prasyarat wajib bagi Desa Mojowarno yang ingin terus maju. Aspek berikutnya dari dimensi *smart mobility* ini adalah lalu lintas. Berada di jalur utama Rembang-Semarang arus lalu lintas di sekitar desa ini kini semakin ramai lalu lalang. Perlu sekiranya diperkuat *smart mobility* yang praktis sebagai penghubung dari desa ke kota atau sebaliknya. Di negara-negara maju pada umumnya transportasi publik sudah terintegrasi secara baik (Adamowicz & Zwolińska-Ligaj, 2020).

Aspek ketiga adalah transportasi publik, transportasi publik seperti bus dengan berbagai trayek paling mendominasi di wilayah ini. Adapun dimensi yang keempat adalah *smart living*, pada dimensi ini, aspek yang pertama adalah teknologi. Untuk teknologi secara umum masyarakat Desa Mojowarno sudah melek teknologi. Pada aspek ini ada beberapa keunggulan yang diciptakan oleh Pemerintah, antara lain pertama adanya fasilitas kepada masyarakat desa yang masih gagap atau belum melek teknologi, kemudian kedua mengadakan berbagai *workshop* digital yang diikuti berbagai lapisan masyarakat semua usia dan latar belakang. Ketiga gencarnya sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi pelayanan publik yang dihadirkan oleh Pemerintah Desa Mojowarno.

Untuk dimensi yang keempat adalah kesehatan dan keamanan. Fasilitas kesehatan di Desa Mojowarno saat ini belum ada klinik kesehatan ataupun rumah sakit, akan tetapi akses untuk menuju rumah sakit ataupun puskesmas relatif cepat dan

terjangkau. Untuk fasilitas kesehatan yang ada di desa ini antara lain yakni bidan desa yang siap 24 jam melayani masyarakat.

Pada proses layanan digital kesehatan, Pemerintah Desa Mojowarno sudah terhubung dengan berbagai lembaga kesehatan seperti Puskesmas, RSUD dan berbagai lembaga kesehatan lainnya. Misalnya ketika masyarakat sakit, dengan memasukkan NIK dalam anjungan pelayanan mandiri, maka akan terhubung dengan Puskesmas Kaliori dan bila membutuhkan rujukan, dapat langsung mendapatkan rujukan untuk ke fasilitas layanan kesehatan berikutnya, seperti di RSUD Dr. Sutrasno Rembang, Untuk bidang keamanan, beberapa kali Pemerintah Desa Mojowarno juga memberi informasi kepada masyarakat terkait pentingnya sistem keamanan lingkungan, juga sering *merepost* informasi-informasi dari aparat keamanan seperti dari Polres Rembang, Kodim Rembang, Polda Jateng dan berbagai informasi keamanan lainnya.

Dimensi yang kelima adalah dimensi *smart governance*. Dimensi ini ditandai dengan adanya kolaborasi antar aktor yang memiliki kekuatan berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Duan dkk., 2020). Adapun aspek yang pertama dalam *smart governance* ini adalah transparansi. Untuk transparansi keuangan semua anggaran APBDes ditampilkan di website desa serta di cetak juga dan dipasang dalam ukuran besar di tempat-tempat strategis. Sebagaimana penjelasan penulis sebelumnya, prinsip transparansi ini juga dilaksanakan Pemerintah Desa Mojowarno.

Untuk aspek kedua, pelayanan sosial serta pelayanan publik, Pemerintah Desa Mojowarno sangat tanggap. Misalnya di *website* Desa Mojowarno, masyarakat ada beberapa layanan unggulan yang dihadirkan di Desa Mojowarno, pelayanan-pelayanan tersebut antara lain sebagai berikut: pertama, Pak De Mono (Pelayanan Mandiri Mojowarno) masyarakat bila ingin memanfaatkan ini bisa menggunakan android atau juga datang ke Balai Desa Mojowarno dengan memanfaatkan alat serupa ATM. Kedua, Pecel Lele (Masyarakat Desa Mojowarno bila ingin mengurus administrasi kependudukan dapat memanfaatkan pelayanan secara praktis dan mudah.

Dimensi berikutnya adalah *smart tourism*. *Smart tourism* ini mengandung maksud bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan media digital dalam mengembangkan potensi budaya dan pariwisata (Lee dkk., 2020). *Smart tourism* juga mengandung maksud bagaimana bisnis, teknologi dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan seiring (Gretzel dkk., 2015). Untuk aspek ini, pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dihadirkan di Desa Mojowarno masih seputar ritual-ritual keagamaan seperti *kenduren*, *kupatan* dan berbagai kegiatan lainnya.

Smart environment, Pemantauan jaringan dan lingkungan. Pada aspek ini mengandung maksud bagaimana digitalisasi yang dicanangkan di Pemerintah Desa Mojowarno mampu menjaga eksistensi lingkungan yang ada di desa (Nelson, 2018). Pada aspek ini pemerintah desa berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Rembang dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tentang upaya menjaga kesehatan lingkungan khususnya diwilayah desa yang banyak ditemui pengusaha garam laut. Adapun gambaran penjelasan bagian ini, kami sederhanakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Dimensi Desa Cerdas di Desa Mojowarno

No.	Dimensi Desa Cerdas	Aspek Desa Cerdas di Desa Mojowarno
1	<i>Smart People</i>	a. Optimalisasi dalam mewujudkan ini dilakukan dengan berbagai pelatihan dan workshop digital sebagai upaya mencerdaskan masyarakat. b. Optimalisasi dilakukan tidak hanya melibatkan perangkat desa, tapi masyarakat multi aktor.
2	<i>Smart Economy</i>	a. Pemerintah Desa Mojowarno menyediakan lapak desa yang berisi produk masyarakat maupun jasa layanan yang disediakan masyarakat. b. Aspek inovasi pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat.

No.	Dimensi Desa Cerdas	Aspek Desa Cerdas di Desa Mojowarno
3	Smart Mobility	a. Pada dimensi ini, aspek pertama yang dilakukan oleh pemerintah Desa adalah pembangunan infrastruktur digital. b. Aspek kedua yang dimaksimalkan oleh pemerintah desa adalah pembangunan infrastruktur jalan, dalam memudahkan transportasi warga.
4	Smart Healthy	Aspek yang dibangun untuk dimensi ini adalah integrasi layanan dari tingkat desa ke tingkat fasilitas layanan pertama dan fasilitas layanan lanjutan, di RSUD misalnya.
5	Smart Governance	Aspek yang diperkuat untuk dimensi ini adalah penguatan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun pelayanan.
6	Smart Tourism	Untuk aspek ini, karena ketiadaan obyek wisata alam maupun buatan di Mojowarno, sehingga belum optimal dalam pengembangannya.
7	Smart Environmental	Pemerintah desa menggandeng aktor-aktor lain baik aktor publik maupun swasta dalam melakukan aksi-aksi kepedulian pada lingkungan.

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3. Transformasi Pelayanan Publik di Desa Mojowarno

Melihat sesuatu yang terjadi di Desa Mojowarno kita dapat meminjam konsep yang ditawarkan oleh Schuelke-Leech, yang mengutarakan pada dasarnya disrupsi memberi efek dalam dua tahapan. Pertama adalah ketika proses disrupsi ini memberi efek pada pasar dan industri. Hal ini adalah suatu kewajaran ketika proses disrupsi atau perubahan dalam penggunaan cara-cara lama kemudian berubah menjadi cara-cara baru diadopsi oleh pasar dan industri (Schuelke-Leech, 2018), Misalnya adalah ketika dulu mengenal pasar hanyalah ruang interaksi secara langsung dalam suatu tempat atau arena keramaian tertentu. Di dalam pasar ada proses tawar menawar dan interaksi jual beli, kemudian proses ini mengalami perubahan menjadi transaksi atau jual beli secara *online*. Meminjam analisis dari Leech ini, dapat kita gunakan untuk melihat apa yang terjadi di Desa Mojowarno. Ketika dulu aktivitas layanan yang dilakukan Pemerintah Desa Mojowarno hanya berjalan dalam satu arah, kemudian dalam ruang kerja yang sempit dalam kantor desa, kini aktivitas layanan tersebut terjadi dalam ruang yang sangat luas dan berjalan dua arah. Demikian juga aktor yang terlibat, bila dulu hanya dua aktor, yakni pemerintah desa dan masyarakat penerima layanan, kini aktor yang terlibat bersifat multi aktor. Aspek “pasar” yang menjadi ruang interaksi ini pun mengalami pergeseran, tak hanya dalam ruang kantor desa, tapi dalam ruang virtual.

Dalam perspektif Schuelke-Leech, proses disrupsi yang kedua terjadi tatkala adanya perubahan interaksi dan relasi sosial, struktur organisasi, lembaga, kebijakan publik dan lingkungan fisik. Apa yang dituliskan oleh Schuelke-Leech, tampaknya benar-benar terjadi dan dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Mojowarno saat-saat ini. Proses disrupsi yang disebabkan dari adanya endemi dan COVID-19 memberi perubahan pada proses interaksi dan relasi sosial antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Masyarakat yang sebelumnya biasa berkumpul di warung-warung kopi atau di pasar. Biasa berkerumun, bercerita, dan bertukar informasi dalam seketika dibatasi oleh aturan dan regulasi. Mereka harus bisa menahan diri untuk bertemu teman atau saudara dekat. Interaksi benar-benar berubah, berganti dari dunia nyata ke dunia maya.

Dari aspek organisasi dan kebijakan juga mengalami perubahan. Bagaimana sebelumnya proses kebijakan yang sebelumnya minim partisipasi masyarakat dan juga minim pengawasan, sekarang lebih kuat dalam pengawasan serta partisipasi masyarakat. Sebelum era desa cerdas seperti ini dan sebelum adanya pelayanan digital diberlakukan di Desa Mojowarno, masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan publik yang ada di desa, beberapa hal yang dikeluhkan antara lain adalah lamanya waktu pelayanan, ketidakpastian pelayanan, serta masyarakat harus datang dan kembali ke rumah untuk mengambil berkas-berkas yang masih tertinggal di rumah, selain itu masyarakat juga harus menunggu saat kepala desa dan perangkat desa tidak ada di kantor, sehingga berbagai kejadian seperti itu mendorong pemerintah

desa untuk melakukan transformasi pelayanan dari era manual ke era digital. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kundholi, mantan kepala desa yang juga pemimpin di Desa Mojowarno.

“Dulu masyarakat Desa Mojowarno banyak yang mengeluh saat mengurus surat-surat kependudukan atau pelayanan publik lainnya. Masyarakat juga sering bertanya-tanya terkait siapa yang mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan, berapa anggaran desa yang dikeluarkan untuk pembangunan dan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya. Tapi semenjak desa cerdas kami terapkan di Desa Mojowarno, berbagai cercaan itu lambat laun berkurang. Bahkan dalam beberapa tahun, desa ini meraih banyak penghargaan” (Kundholi, 2022), ungkap mantan Kepala Desa Mojowarno ini menjelaskan. Untuk lebih jelasnya, uraian penjelasan Schuelke-Leech yang kami pinjam, kami tampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Transformasi Pelayanan Publik di Desa Mojowarno

No.	Unsur Pembeda	Sebelum Desa Cerdas Diterapkan	Setelah Desa Cerdas Diterapkan
1	Aspek pasar dan ruang pelayanan	Dalam ruang pasar, sebelum diterapkan desa cerdas, proses pelayanan hanya terjadi di ruang kantor desa.	Setelah desa cerdas diterapkan, terjadi pergeseran ruang pasar, dari ruang di dunia nyata, bergeser ke ruang dunia maya.
2	Proses interaksi	Sebelumnya proses interaksi hanya berjalan satu arah, dari pelayan (pemerintah desa) ke masyarakat atau lembaga mitra pengguna layanan.	Setelah adanya desa cerdas, proses interaksi berjalan dua arah. Berbagai masukan dan komentar juga bisa diberikan oleh masyarakat pengguna layanan.
3	Aktor yang terlibat	Aktor yang terlibat tunggal atau hanya pemerintah.	Bersifat multi aktor atau banyak pemangku kepentingan yang terlibat.
4	Interaksi dan relasi sosial	Pada umumnya dilakukan dengan tatap muka dan interaksi secara langsung. Relasi dan struktur sosial semakin erat.	Dilakukan dalam ruang digital, relasi dan struktur sosial semakin renggang.
5	Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat sangat minim, tidak ada interaksi dua arah.	Partisipasi masyarakat sangat kuat, bila tidak puas, masyarakat langsung menulis komentar di website desa.

Sumber: Data diolah oleh penulis

4. Kesimpulan

Secara umum *smart village* yang ada di Mojowarno merupakan salah satu pilot project *smart village* di Kabupaten Rembang pada khususnya serta kawasan Eks. Karisedan Pati pada umumnya. Sebagai pilot project dalam pengembangan *smart village*, Desa Mojowarno telah berusaha menerapkan berbagai dimensi *smart village*. Dimensi tersebut antara lain smart government, smart economy, smart people, smart mobility, smart healthy, smart tourism dan smart environmental. Pemerintah Desa Mojowarno juga telah melakukan transformasi pelayanan yang sebelumnya masih manual dengan berbagai keterbatasan, kemudian bertransformasi ke era digital dengan berbagai kelebihan. Apa yang terjadi di Desa Mojowarno memberi pelajaran penting bila desa cerdas terbukti mampu memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya terkait pelayanan publik. Adapun riset lanjutan yang bisa dilakukan antara lain adalah bagaimana misalnya faktor-faktor pendukung bekerjanya desa cerdas atau aktor-aktor seperti apa yang bisa mendukung bekerjanya desa cerdas dalam suatu desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu yang telah mendoakan dan membimbing penulis hingga akhirnya berada di titik ini. Terima kasih kepada pimpinan dan teman-teman dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah mendorong serta memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti berbagai pelatihan menulis. Terima kasih kepada mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam, yang menjadi tumpahan energi bagi penulis dalam mengembangkan literasi. Terima kasih kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang yang telah memberi inspirasi dan menjadi ruang empiris dalam penelitian ini. Terima kasih kepada teman-teman alumni S2 Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM yang telah bersedia menjadi mitra diskusi bagi penulis selama ini.

Referensi

- Adamowicz, M., & Zwolinska-Ligaj, M. (2020). The “Smart Village” as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland. *Sustainability*, 12(16), 6503. <https://doi.org/10.3390/su12166503>
- Agustiono, W. (2022). Smart Villages in Indonesia in the Light of the Literature Review. *2022 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, 01–05. <https://doi.org/10.1109/ICISS55894.2022.9915061>
- Andari, R. N., & Ella, S. (2019). Developing a Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara*, 15(1), 41–58. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394>
- Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 722(1), 012011. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/722/1/012011>
- Badan Pusat Statistik. (2020, September 17). *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Hasil Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2015 - 2035*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI3NiMx/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html>
- BRIN. (2020). Perbedaan Endemi, Epidemi, dan Pandemi. *PPITEK*, 1.
- Bungin, B. (2020). Sumber Data Primer. *Burhan Bungin*.
- Congge, U., Guillamón, M. D., Nurmandi, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2023). Digital Democracy: A Systematic Literature Review. *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.972802>
- de Lange, M. (2018). 18. The Playful City: Citizens Making the Smart City. Dalam *The Playful Citizen* (hlm. 349–369). Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1515/9789048535200-021>
- Degada, A., Thapliyal, H., & Mohanty, S. P. (2021). Smart Village: An IoT Based Digital Transformation. *2021 IEEE 7th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, 459–463. <https://doi.org/10.1109/WF-IoT51360.2021.9594980>
- Dendhart, Janet V, Denhart, R. (2015). The New Public Service Revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664–672. <https://www.jstor.org/stable/24757439>
- Duan, X., Dai, S., Yang, R., Duan, Z., & Tang, Y. (2020). Environmental Collaborative Governance Degree of Government, Corporation, and Public. *Sustainability*, 12(3), 1138. <https://doi.org/10.3390/su12031138>
- Edelmann, N., & Virkar, S. (2023). The Impact of Sustainability on Co-Creation of Digital Public Services. *Administrative Sciences*, 13(2), 43. <https://doi.org/10.3390/admsci13020043>
- Fahrurrohimi. (2022). *Wawancara dengan Fahrurrohimi Kasi Kesejahteraan*.
- Faisal, & Suharjito. (2021). Smart Village Design using Enterprise Architecture Framework Model. *2021 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*, 212–217. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech53080.2021.9535107>
- Febri Ramadhan, R., & Tamaya, V. (2021). Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi COVID-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.35912/jasipol.v1i1.365>
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart Tourism: Foundations and Developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>
- Haryati, E., & Ferriswara, D. (2020). Kebijakan Responsif Sebagai Instrumen Transformasi Pelayanan Publik pada Masa Pandemi COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 1(1), 259–270. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.831>
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.33164/iptekom.21.1.2019.1-16>
- Jiang, H., Geertman, S., & Witte, P. (2023). The Contextualization of Smart City Technologies: An International Comparison. *Journal of Urban Management*, 12(1), 33–43. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2022.09.001>
- Komorowski, Ł., & Stanny, M. (2020). Smart Villages: Where Can They Happen? *Land*, 9(5), 151. <https://doi.org/10.3390/LAND9050151>
- Kundholi. (2022). *Wawancara dengan Kepala Desa Mojowarno*.
- Lakshmanan, V. I., Chockalingam, A., Murty, V. K., & Kalyanasundaram, S. (2021). *Smart Villages*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68458-7>
- Lee, P., Hunter, W. C., & Chung, N. (2020). Smart Tourism City: Developments and Transformations. *Sustainability*, 12(10), 3958. <https://doi.org/10.3390/SU12103958>

- Leech, B. A.-S. (2018). A model for understanding the orders of magnitude of disruptive technologies. *Technological Forecasting and Social Change*, 129(April), 261–274.
- Maharani, E. N., & Kencono, D. S. (2021). Penerapan Smart Governance dalam Smart Village di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 25–38. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.14472>
- Mojowarno. (2023). *Data Desa Mojowarno*.
- Nelson, A. (2018). Ecovillages: Sustainability and System Change. Dalam *Small is Necessary: Shared Living on a Shared Planet* (hlm. 130–158). Pluto Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1zk0mpz.12>
- Noor, K. B. M. (2008). Case study: A strategic research methodology. Dalam *American Journal of Applied Sciences*. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2008.1602.1604>
- Nurfarida, D. (2019). Penerapan Smart Village pada Pengembangan BUMDes di Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang*, 4(1), 102–106. <https://doi.org/10.55686/ristek.v4i1.70>
- Nursetiawan, I. (2020). Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Smart Village. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 112–120. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3420>
- Pangestuti, D. D., Susanto, T. D., & Trisunarno, L. (2021). Measuring Smart Cities: Identification of Smart Society Indicators in Indonesia. 2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 1245–1249. <https://doi.org/10.1109/IEEM50564.2021.9672779>
- Pratama, A. B. (2019). The Landscape of Public Service Innovation in Indonesia. *Innovation & Management Review*, 17(1), 25–40. <https://doi.org/10.1108/inmr-11-2018-0080>
- Rifani, D. N. (2021). Pelayanan Publik pada Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 115–124. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3761>
- Sánchez-Huertas, L. F., & Garbiras, M. M. M. (2023). La democracia digital en la gobernanza local. *Opera*, 33, 35–53. <https://doi.org/10.18601/16578651.n33.03>
- Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., & Novianto, A. (2019). *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*. Center for Digital Society. https://www.researchgate.net/publication/341104216_Desa_Cerdas_Transformasi_Kebijakan_dan_Pembangunan_Desa_Merespon_Era_Revolusi_Industri_40
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57–65. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sulistiyowati. (2023). Wawancara dengan Masyarakat Desa Mojowarno.
- Susanti, W. F., Jannatuzzahra, K., Kartika, A. D. P., & Mukaromah, S. (2023). Upaya dalam Mengurangi Kesenjangan Digital pada Penerapan Smart Village. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 334–343. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.336>
- Vanolo, A. (2014). Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy. *Urban Studies*, 51(5), 883–898. <https://doi.org/10.1177/0042098013494427>
- Yulianto, A. (2020). Pengembangan Aplikasi Desa Pintar Kelurahan Karang Timur Berbasis Android. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 5(1), 54–68. <https://doi.org/10.33395/remik.v5i1.10683>